

EFEKTIVITAS INSTRUMEN EKONOMI PUBLIK DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN

Anisa Febrianti¹

Anisafebrianti441@Gmail.Com¹

Hendra Riovita²

Hendrariofita@Yahoo.Com²

^{1,2}Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Income inequality is a structural challenge faced by many countries, including Indonesia. Public economic instruments, such as progressive taxes, state spending, subsidies, and social protection programs, are expected to be effective tools in reducing income disparities between community groups. This study aims to analyze the effectiveness of these public economic instruments in the Indonesian context. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach through analysis of various relevant reliable literature sources. The results of the study show that although public economic instruments have great potential in creating a more equitable distribution of income, their effectiveness is still hampered by various problems such as inaccurate targeting of social assistance, a suboptimal taxation system, and weak governance and transparency. In addition, challenges such as the existence of an informal sector that has not been integrated into the fiscal and social system, as well as development disparities between regions, also exacerbate inequality. Therefore, to increase the effectiveness of public economic policies, comprehensive reforms are needed that include strengthening institutions, utilizing digital technology for data integration, and a fiscal policy approach that is responsive to local conditions. This research is expected to contribute to the formulation of more inclusive, fair, and sustainable policies in order to reduce the level of income inequality in Indonesia.

Keywords: *Income Inequality, Public Economy, Fiscal Policy, Progressive Tax, Social Spending.*

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan merupakan tantangan struktural yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Instrumen ekonomi publik, seperti pajak progresif, belanja negara, subsidi, dan program perlindungan sosial, diharapkan mampu menjadi alat yang efektif dalam menekan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari instrumen-instrumen ekonomi publik tersebut dalam konteks Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur terpercaya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen ekonomi publik memiliki potensi besar dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata, efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, sistem perpajakan yang belum optimal, serta lemahnya tata kelola dan transparansi. Selain itu, tantangan seperti keberadaan sektor informal yang belum terintegrasi dalam sistem fiskal dan sosial, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah,

juga turut memperparah ketimpangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi publik, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital untuk integrasi data, serta pendekatan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kondisi lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam rangka menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Ekonomi Publik, Kebijakan Fiskal, Pajak Progresif, Belanja Social.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan tidak hanya berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan yang harus diperhatikan secara bersamaan. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah untuk mencapai keseimbangan antara tiga pilar penting: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek ini harus berkembang seimbang dan saling mendukung untuk menciptakan hasil yang adil dan berkelanjutan. Negara dengan sumber daya alam yang melimpah sering menghadapi tantangan besar, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan yang serius (Suparmoko, 2020). Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor dan kebijakan yang komprehensif, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, pengelolaan lingkungan yang baik, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana (Utami, et al, 2023).

Ekonomi publik sebagai bagian integral dari kebijakan pemerintah, memegang peran sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Kebijakan fiskal yang dikelola oleh pemerintah dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Penerapan kebijakan yang tepat di sektor ini akan sangat menentukan jalannya pembangunan, baik dalam hal penyediaan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun pengelolaan sumber daya alam (Yunus, 2021). Namun, meskipun ekonomi publik memiliki potensi yang besar, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Beberapa wilayah, terutama daerah-daerah terpencil dan pedesaan, masih tertinggal dalam hal akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang memadai. Sementara itu, kawasan perkotaan seringkali mengalami masalah overpopulasi, kemacetan, dan polusi yang membahayakan kualitas hidup warganya. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sering kali berada dalam dilema

antara eksploitasi yang cepat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Ketergantungan negara terhadap sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan besar seringkali menimbulkan kerusakan ekosistem yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang bergantung langsung pada sumber daya alam (Ferlita, et al, 2024).

Dengan melihat permasalahan ini, penting untuk memahami bahwa peran ekonomi publik dalam pembangunan berkelanjutan bukan hanya terbatas pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi semata. Sebaliknya, ekonomi publik harus dapat memastikan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata, mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan sosial dan lingkungan. Peran ekonomi publik menjadi lebih penting karena tantangan besar yang dihadapi negara ini, baik dari segi ketimpangan sosial, masalah pengelolaan lingkungan, hingga ketergantungan pada sektor ekstraktif yang kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi publik harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan yang lebih luas, termasuk ekonomi hijau, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup (Safira, et al, 2024)

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan struktural yang dihadapi oleh banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Ketimpangan ini mengacu pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara

individu atau kelompok dalam suatu masyarakat, yang kemudian menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam jangka panjang, ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesempatan sosial, dan meningkatkan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran sentral dalam merancang kebijakan yang mampu menekan ketimpangan pendapatan demi menciptakan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang digunakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan adalah melalui instrumen ekonomi publik. Instrumen ini mencakup berbagai kebijakan fiskal seperti pajak, subsidi, belanja negara, serta program perlindungan sosial. Tujuan utama dari penggunaan instrumen ini adalah untuk melakukan redistribusi pendapatan agar terjadi pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Pajak, misalnya, tidak hanya menjadi sumber utama penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi konsentrasi kekayaan. Pajak progresif dapat meningkatkan kontribusi dari kelompok berpenghasilan tinggi, sementara belanja sosial dan subsidi dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan. Efektivitas instrumen ekonomi publik dalam mengurangi ketimpangan pendapatan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh pelaksanaan dan evaluasi yang tepat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tantangan dalam implementasi kebijakan publik sangat kompleks. Masalah seperti kebocoran anggaran, korupsi, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, serta sistem perpajakan yang belum optimal sering kali menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, selain

perancangan yang matang, transparansi, akuntabilitas, dan reformasi kelembagaan juga menjadi prasyarat penting agar instrumen ekonomi publik dapat bekerja secara efektif. Seiring dengan berkembangnya paradigma pembangunan yang inklusif, perhatian terhadap ketimpangan pendapatan semakin meningkat. Badan-badan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyoroti pentingnya pemerataan sebagai bagian dari agenda pembangunan global. Di Indonesia, ketimpangan pendapatan sering diukur dengan Indeks Gini yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Walaupun terjadi peningkatan pendapatan nasional secara agregat, namun manfaat dari pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa upaya redistribusi melalui instrumen ekonomi publik masih perlu diperkuat dan disempurnakan.

Penelitian tentang efektivitas instrumen ekonomi publik menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan berhasil mencapai tujuan pemerataan. Analisis terhadap sistem perpajakan, alokasi belanja negara, serta program-program bantuan sosial perlu dilakukan secara mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat efektivitasnya. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap instrumen-instrumen ini, pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran dalam menekan ketimpangan pendapatan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai efektivitas instrumen

ekonomi publik dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Fokus utama adalah pada bagaimana desain, implementasi, serta dampak dari kebijakan-kebijakan fiskal dapat mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. Diharapkan, pembahasan ini dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam konteks pembangunan nasional.

LITERATURE REVIEW

Ekonomi Publik

Ekonomi publik, atau sering disebut sebagai public economics, adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, terutama dalam hal bagaimana pemerintah mengumpulkan dan membelanjakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengatasi berbagai bentuk kegagalan pasar. Ekonomi publik membahas interaksi antara sektor publik dan sektor swasta, serta bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi seperti efisiensi, pemerataan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, ekonomi publik dapat diartikan sebagai ilmu yang menganalisis bagaimana pemerintah dapat merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Cakupan kajiannya meliputi pajak, belanja pemerintah, subsidi, program kesejahteraan sosial, penyediaan barang dan jasa publik, serta regulasi terhadap kegiatan ekonomi.

Selain itu, ekonomi publik juga mempelajari tentang kegagalan pasar (market failure), yaitu kondisi di mana mekanisme pasar tidak mampu menghasilkan hasil yang efisien atau adil. Contoh kegagalan pasar antara lain adalah eksternalitas (seperti

polusi), barang publik (yang bersifat non-rival dan non-eksklusif), asimetri informasi, dan kekuatan monopoli. Dalam situasi seperti itu, campur tangan pemerintah diperlukan untuk memperbaiki kondisi pasar dan menciptakan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Instrumen utama dalam ekonomi publik adalah kebijakan fiskal, yang mencakup kebijakan penerimaan negara (terutama pajak) dan pengeluaran negara (belanja publik). Pajak digunakan tidak hanya untuk membiayai pengeluaran pemerintah, tetapi juga sebagai alat redistribusi pendapatan dan pengendalian perilaku ekonomi. Di sisi lain, belanja negara diarahkan untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur, dan program bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. (Hendra Riofita, 2024)

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, peran ekonomi publik sangat krusial untuk mendorong pembangunan yang inklusif. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator dan penyedia layanan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam mengintervensi pasar demi memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman tentang ekonomi publik sangat penting bagi perancang kebijakan, akademisi, maupun masyarakat umum untuk menilai efektivitas dan keadilan dari kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan.

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi di mana distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat tidak merata, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok individu atau rumah tangga dengan pendapatan tinggi dan mereka yang berpendapatan rendah. (Dika Hasto

Muhammad Afif, 2022) Ketimpangan ini mencerminkan sejauh mana pendapatan nasional atau kekayaan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan kata lain, semakin besar ketimpangan pendapatan, semakin besar pula jurang antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dalam suatu negara. Secara ekonomi, ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satunya adalah Indeks Gini, yang berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna dan merata (setiap individu memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai 1 mencerminkan ketimpangan yang sempurna (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu individu). Selain Indeks Gini, ketimpangan juga dapat diukur melalui rasio antara pendapatan kelompok 20% teratas dengan kelompok 40% terbawah, atau menggunakan kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan dalam populasi. (Hendra Riofita, 2018)

Ketimpangan pendapatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik struktural maupun kebijakan. Faktor struktural meliputi perbedaan tingkat pendidikan, keterampilan, akses terhadap pekerjaan yang layak, serta perbedaan kepemilikan aset produktif seperti tanah dan modal. Sementara itu, kebijakan ekonomi seperti sistem perpajakan yang tidak progresif, subsidi yang tidak tepat sasaran, atau minimnya perlindungan sosial juga dapat memperparah ketimpangan. Globalisasi dan kemajuan teknologi pun turut berperan, karena cenderung memberikan keuntungan lebih besar kepada tenaga kerja berpendidikan tinggi dan pemilik modal, sementara kelompok dengan keterampilan rendah

semakin tertinggal. Dampak dari ketimpangan pendapatan sangat luas. Dalam jangka panjang, ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi stabilitas sosial, meningkatkan tingkat kejahatan, serta menurunkan kualitas demokrasi. Ketimpangan juga dapat menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi, di mana anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang baik, sehingga sulit keluar dari kondisi ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, mengurangi ketimpangan pendapatan menjadi salah satu tujuan utama dari kebijakan ekonomi publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat melalui mekanisme redistribusi, seperti pajak progresif, belanja sosial, dan subsidi yang ditujukan kepada kelompok rentan. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan keadilan sosial, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai jurnal dan skripsi terpercaya yang relevan, yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kredibilitasnya, dengan mempertimbangkan aspek keandalan, relevansi, dan kontribusi terhadap kajian terkait program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Data yang dikumpulkan mencakup hasil penelitian terdahulu yang mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial, tantangan dalam implementasinya, serta dampaknya terhadap

kesejahteraan masyarakat miskin. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, serta perbedaan dalam hasil penelitian yang ada. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif guna menggambarkan secara komprehensif tentang Efektivitas Instrumen Ekonomi Publik dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas instrumen ekonomi publik dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Berdasarkan hasil telaah literatur dan studi kepustakaan dari berbagai jurnal ilmiah serta kajian sebelumnya, ditemukan bahwa kebijakan fiskal seperti perpajakan dan belanja pemerintah memainkan peran strategis dalam upaya redistribusi pendapatan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada desain kebijakan yang tepat, implementasi yang transparan, serta pengawasan yang akuntabel. Salah satu instrumen utama dalam ekonomi publik yang paling banyak dibahas adalah pajak. Pajak progresif, di mana tarif meningkat seiring bertambahnya pendapatan, dianggap sebagai alat yang efektif dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diterapkan pada tahun-tahun terakhir bertujuan untuk memperkuat sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan. Namun demikian, studi seperti yang dilakukan oleh Arianty (2022) menunjukkan bahwa penerapan pajak progresif di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam aspek kepatuhan wajib

pajak dan optimalisasi basis pajak. Banyak individu dan entitas bisnis yang masih berhasil menghindari pajak melalui celah regulasi atau praktik-praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk belanja sosial seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan bantuan langsung tunai (BLT) juga menjadi bagian penting dari instrumen ekonomi publik. Studi Widodo et al. (2011) menemukan bahwa peningkatan belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki efek positif terhadap pengentasan kemiskinan, yang secara tidak langsung dapat mempersempit ketimpangan pendapatan. Namun, efektivitas dari program-program ini sering terhambat oleh persoalan birokrasi, kurangnya data yang valid, serta distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran. Ketika subsidi atau bantuan sosial tidak sampai kepada kelompok yang seharusnya menerima, tujuan utama dari redistribusi pendapatan menjadi tidak tercapai.

Penelitian Dika Hasto Muhammad Afif (2022) menekankan pentingnya memperhatikan faktor-faktor struktural dalam memahami ketimpangan pendapatan di tingkat daerah. Ia menemukan bahwa ketimpangan antar wilayah di Indonesia dipengaruhi oleh variasi dalam pembangunan infrastruktur, kualitas pendidikan, dan akses terhadap pekerjaan produktif. Oleh karena itu, instrumen ekonomi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang bersifat sentralistik kadang-kadang gagal menjawab kebutuhan spesifik di daerah terpencil atau terbelakang. Dalam praktiknya, efektivitas instrumen ekonomi publik tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dikeluarkan atau seberapa tinggi tarif

pajak yang diberlakukan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemampuan kebijakan tersebut untuk mengurangi ketimpangan. Misalnya, dalam pengelolaan subsidi energi, pemerintah sempat memberikan subsidi secara luas tanpa membedakan kelompok pendapatan. Kebijakan ini justru lebih banyak menguntungkan kelompok menengah atas yang lebih banyak mengonsumsi energi, sehingga memperlebar ketimpangan. Namun, reformasi subsidi yang diarahkan hanya kepada kelompok miskin, seperti subsidi listrik untuk daya 450VA dan 900VA, telah memperbaiki target kebijakan, meskipun tantangan dalam pendataan masih menjadi pekerjaan rumah.

Penting pula untuk membahas peran program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program-program ini merupakan bentuk nyata dari belanja pemerintah untuk meningkatkan akses kelompok miskin terhadap layanan dasar. Studi-studi yang dilakukan pada PKH menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran dan keberlanjutan program. Kegagalan dalam verifikasi dan validasi data penerima menyebabkan adanya fenomena inclusion error (mereka yang tidak berhak menerima justru menerima bantuan) dan exclusion error (yang seharusnya menerima malah terlewatkan).

Selain kebijakan domestik, aspek globalisasi dan liberalisasi ekonomi juga memiliki dampak terhadap ketimpangan. Kemajuan teknologi dan integrasi ekonomi global memberikan keuntungan besar kepada kelompok berpendidikan tinggi dan

berkapital besar, sementara kelompok berpendapatan rendah semakin terpinggirkan. Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi publik harus mampu menjadi penyeimbang agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja menjadi sangat penting untuk meningkatkan mobilitas sosial dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Faktor lain yang tidak dapat diabaikan adalah korupsi dan tata kelola pemerintahan. Korupsi yang merajalela dalam sistem anggaran negara akan menurunkan efektivitas belanja publik. Ketika anggaran pembangunan disalahgunakan, maka masyarakat tidak mendapatkan manfaat maksimal dari instrumen ekonomi publik. Transparansi anggaran dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa belanja publik benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, bukan memperkaya segelintir elite.

Secara teoritis, efektivitas instrumen ekonomi publik dalam mengurangi ketimpangan pendapatan selaras dengan prinsip redistribusi yang dikemukakan oleh Richard Musgrave. Pemerintah memiliki fungsi distributif, yaitu untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan kekayaan agar lebih adil melalui kebijakan fiskal. Namun dalam implementasinya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan prinsip tersebut ke dalam sistem kebijakan yang konsisten dan tepat sasaran. Bahkan di era digital seperti sekarang, teknologi belum sepenuhnya digunakan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan distribusi bantuan sosial secara akurat dan efisien.

Pembahasan lain yang penting adalah mengenai sektor informal. Sebagian besar

tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan formal. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk merancang sistem perpajakan yang inklusif serta program jaminan sosial yang bisa menjangkau kelompok pekerja ini. Tanpa mencakup sektor informal, tujuan dari pemerataan pendapatan akan sulit dicapai, karena sebagian besar kelompok miskin dan rentan berada di sektor ini. Dengan memperhatikan berbagai studi dan bukti empiris yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa instrumen ekonomi publik memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, namun efektivitasnya sangat tergantung pada good governance, data yang akurat, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Reformasi fiskal harus dilandasi oleh semangat keadilan sosial, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan. Penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital untuk integrasi data penerima bantuan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran publik merupakan langkah penting ke depan. Dengan kata lain, ekonomi publik bukan hanya bicara tentang angka-angka dalam APBN atau APBD, tetapi tentang bagaimana uang negara dapat digunakan secara bijak untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata. Upaya mengurangi ketimpangan pendapatan harus terus dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan semua pihak, dan berorientasi pada hasil nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat—terutama mereka yang selama ini tertinggal dari arus utama pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa instrumen ekonomi publik memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Instrumen seperti pajak progresif, belanja negara yang diarahkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, serta program subsidi yang tepat sasaran, terbukti dapat mendukung upaya redistribusi pendapatan secara adil dan berkeadilan. Namun, efektivitas instrumen-instrumen tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Masalah seperti ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial, sistem perpajakan yang belum optimal, kurangnya integrasi data, serta rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan menjadi penghambat utama dalam pencapaian tujuan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, masih adanya ketimpangan antarwilayah dan belum terintegrasinya sektor informal dalam sistem perlindungan sosial turut memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, keberhasilan instrumen ekonomi publik dalam mengatasi ketimpangan pendapatan sangat bergantung pada sinergi antara perumusan kebijakan yang tepat, implementasi yang efektif, serta pengawasan yang transparan dan partisipatif. Pemerintah dituntut untuk terus melakukan reformasi fiskal yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada data yang akurat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Saran

1. Perbaiki Sistem Perpajakan

Pemerintah perlu memperkuat sistem perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan pajak, dan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Pengembangan sistem digital yang terintegrasi dan transparan juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pemungutan pajak.

2. Penajaman Target Bantuan Sosial

Validasi dan verifikasi data penerima bantuan sosial harus ditingkatkan untuk menghindari kesalahan sasaran. Pemanfaatan teknologi digital seperti big data dan sistem identitas tunggal (misalnya NIK) dapat menjadi solusi dalam menyalurkan bantuan secara lebih tepat dan efisien.

3. Peningkatan Investasi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Pengeluaran negara sebaiknya lebih difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah tertinggal. Akses yang merata terhadap layanan dasar ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkecil kesenjangan sosial dalam jangka panjang.

4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola

Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan untuk menjamin efektivitas kebijakan publik. Transparansi anggaran dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran dapat memperkuat akuntabilitas publik.

5. Integrasi Sektor Informal dalam Kebijakan Publik

Pemerintah perlu merancang sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang juga menyasar sektor informal,

mengingat banyaknya pekerja yang berada dalam sektor ini. Hal ini penting agar kebijakan distribusi pendapatan menjangkau lebih luas dan inklusif.

6. Desentralisasi Kebijakan Fiskal yang Responsif Daerah

Pemerintah pusat harus memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan fiskal yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing daerah, sehingga instrumen ekonomi publik dapat berjalan lebih efektif secara lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 5(1), 1.
- Badriah, L. S. (2019). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 9(1), 232–248
- Dika Hasto Muhammad Afif. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2018. *Diponegoro Journal Of Economics* Volume 11, Nomor 3, Tahun 2022, Halaman 176
- Khairani Matondang, Febriana Krisdayanti Barus, Khairiah, Dilli Salsa Fira, Dwi Susanti. Studi Literatur : Peran Ekonomi Publik Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 4, 2024
- Hendra Riofita, (2018). Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, vol 2, no 1.
- Hendra Riofita. Augmenting Islamic Digital Payment Effect On Muslim Customer Purchase Decision On Micro, Small And Medium Enterprises' (Msmes) Products. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 10, No. 4 (2024), pp. 735 – 758
- Hendra Riofita. Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 13 Number 2*, 2024: 137–151
- Kusuma, N. R., Hamidah, I., & Fitriani, N. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Konferensi Nasional Studi Islam (KONASI)*, 1, 142-153.
- Meiyenti, I., Agustina, I., Primadhany, E. F., Tumija, T., & Nalien, E. M. (2023). Menganalisis Kebijakan Fiskal dan Moneter: Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 186-195.
- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Yogyakarta : Cipta Media Nusantara
- Safira, T., Mauridhoh, M. M., & Yasin, M. (2024). Analisis Potret Ekonomi Publik Indonesia Meliputi Tanaman Palawija, Perkebunan, Kehutanan, Perternakan Dan Perikanan. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(3), 01-11.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan

- regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1), 39-50.
- Sugiyono. Prof, D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Utami, N., Saragih, R. F., Daulay, M., Maulana, M. D., & Ramadani, P. (2023). Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi Indonesia. *Journal of Management and Social Sciences*, 2(1), 46-59
- Widodo, A., Waridin, & Maria K., J. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25–42.
- Winarno, W. W. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews (Ketiga)*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP STIM YKPN).